

**TANTANGAN COLLABORATIVE GOVERNANCE BERBASIS TRIPLE HELIX
DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH**

Ihsan Hidayatullah¹, Lusi Endri Yani², Afrijal³, Lathifah Nurainy⁴, Irvan Shouldan⁵

^{1,3,4,5}Universitas Syiah Kuala

²Universitas Negeri Padang

Email Korespodensi: ihsanhidayatullah28@gmail.com

Email: lusiendriyani78@gmail.com; afrijal@usk.ac.id; lathifahnurainy22@gmail.com;

irvan2245@gmail.com

ABSTRACT

Aceh Province faces a persistent development paradox, in which the flow of funds from the Aceh Special Autonomy Fund (DOKA) amounting to trillions of rupiah annually has failed to significantly reduce poverty rates; in fact, Aceh's poverty rate remains the highest on the island of Sumatra, standing at 12.22% as of September 2025, far above the national average. This situation indicates that the issue of poverty in Aceh is linked to suboptimal collaborative governance. This study aims to analyze the challenges of Triple Helix-based collaborative governance in efforts to reduce poverty rates in Aceh Province. The study employs a Systematic Literature Review (SLR) approach with data analysis through thematic synthesis, encompassing three stages: open-text coding, descriptive theme grouping, and the development of analytical themes. The results of the study identified five main challenges: the dominance of bureaucracy and power asymmetry in the lead organization model, which positions government actors such as Bappeda/TKPK as the sole controllers; weak facilitative leadership characterized by a directive-hierarchical nature; institutional logic conflicts among the government, academia, and industry; low involvement of universities as strategic partners; and data inconsistencies and a weak integrated information system. This study concludes that the transformation toward effective collaborative governance in Aceh requires a paradigmatic shift from the dominance of a lead organization toward shared governance, from formal accountability toward substantive accountability, and from ceremonial involvement toward strategic partnerships that position the government, academia, and industry as complementary partners within an inclusive social innovation ecosystem.

Keywords: collaborative governance, triple helix, poverty, Aceh, Aceh Special Autonomy Fund.

ABSTRAK

Provinsi Aceh menghadapi paradoks pembangunan yang konsisten, di mana aliran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) bernilai triliunan rupiah per-tahun tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, bahkan angka kemiskinan Aceh tetap menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera dengan persentase 12,22% pada September 2025, jauh di atas rata-rata nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan kemiskinan di Aceh terkait *collaborative governance* yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan *collaborative governance* berbasis *Triple Helix* dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan analisis data melalui *thematic synthesis* yang mencakup tiga tahap, yaitu pengkodean teks bebas, pengelompokan tema deskriptif, dan pengembangan tema analitik. Hasil penelitian mengidentifikasi lima tantangan utama, yaitu dominasi birokrasi dan asimetri kekuasaan dalam model *lead organization* yang menempatkan aktor Pemerintah seperti Bappeda/TKPK sebagai pemegang kendali tunggal; lemahnya kepemimpinan fasilitatif yang bersifat direktif-hierarkis; konflik logika institusional antara pemerintah, akademisi, dan industri; rendahnya keterlibatan perguruan tinggi sebagai mitra strategis; serta ketidaksinkronan data dan lemahnya sistem informasi terpadu. Penelitian ini menyimpulkan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

362

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



bahwa transformasi menuju *collaborative governance* yang efektif di Aceh membutuhkan pergeseran paradigmatik dari dominasi *lead organization* menuju *shared governance*, dari akuntabilitas formal menuju akuntabilitas substantif, dan dari keterlibatan seremonial menuju kemitraan strategis yang menempatkan pemerintah, akademisi, dan industri sebagai mitra yang saling melengkapi dalam ekosistem inovasi sosial yang inklusif.

Kata kunci: Kolaborasi Pemerintahan, *Triple Helix*, Kemiskinan, Aceh, Dana Otonomi Khusus Aceh.

PENDAHULUAN

Kemiskinan telah lama diakui sebagai persoalan pembangunan yang melintasi batas-batas sektor, menyentuh sektor ekonomi, sosial, politik, dan budaya secara bersamaan. Itulah sebabnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai tujuan pertama dan paling mendasar dari agenda pembangunan global hingga tahun 2030 (Haris, 2024). Kemiskinan diukur dari berbagai dimensi sekaligus ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, terbatasnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, minimnya infrastruktur, serta tertutupnya ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Seluruh dimensi itu menjadikan kemiskinan sebagai ujian sesungguhnya bagi kualitas tata kelola suatu bangsa.

Indonesia mencatat perjalanan panjang dalam upaya penurunan angka kemiskinan selama satu dekade terakhir. Pandemi COVID-19 membalikkan sebagian besar capaian tersebut, berdasarkan Badan Pusat Statistik angka kemiskinan nasional melonjak ke 9,78% atau sekitar 26,42 juta jiwa pada Maret 2020, kemudian merangkak naik lagi menjadi 10,14% pada Maret 2021 (BPS, 2021). Setelah itu, serangkaian kebijakan pemulihan ekonomi nasional berangsur-angsur membuahkan hasil. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin turun ke angka 9,03 %, dan kembali menyusut menjadi 8,57% pada September 2024 level terendah dalam satu dekade (BPS, 2024). Capaian ini menandai keberhasilan kebijakan perlindungan sosial dan digitalisasi bantuan yang meningkatkan ketepatan sasaran. Namun di balik angka agregat yang membaik, ketimpangan antarprovinsi justru semakin terlihat jelas dan memerlukan perhatian khusus.

Sebagai daerah yang memiliki status otonomi khusus, provinsi Aceh menghadirkan gambaran yang sulit dijelaskan dengan logika pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, provinsi Aceh memiliki status Otonomi Khusus yang disertai aliran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) bernilai triliunan rupiah per tahun, dirancang untuk mempercepat pemulihan pascakonflik dan bencana tsunami (Putra & Amran, 2023). Terlepas dari keistimewaan fiskal tersebut, Aceh secara konsisten menempati posisi sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Sumatera. Pada Maret 2024, angka kemiskinan Aceh masih tercatat 14,23 % jauh di atas rata-rata nasional 9,03%. Terdapat progres yang patut diapresiasi, angka tersebut turun menjadi 12,64 % pada September 2024 dan 12,22% pada September 2025 (BPS Aceh, 2025). Akan tetapi, progres pada angka persentase itu berjalan bersamaan dengan memburuknya kualitas kemiskinan yang tersisa. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 1,836 pada Maret 2025 menjadi 2,055 pada September 2025, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik dari 0,420 menjadi 0,523 pada periode yang sama (BPS Aceh, 2025). Angka-angka tersebut mengisyaratkan bahwa kelompok masyarakat paling bawah semakin jauh tertinggal, dan intervensi yang ada belum menjangkau mereka secara efektif.

Akar dari permasalahan tersebut ditelusuri oleh berbagai peneliti pada persoalan tata kelola yang belum memadai. Distribusi DOKA yang diatur Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013, 60% untuk tingkat provinsi dan 40 % untuk kabupaten/kota dalam praktiknya menciptakan ketidaksinkronan program antara dua level/tingkatan pemerintahan tersebut, sehingga intervensi di gampong (desa) sering sekali kehilangan daya (Putra & Amran, 2023). Porsi besar dana mengalir ke proyek infrastruktur fisik berskala besar, sementara program pemberdayaan ekonomi langsung bagi kelompok termiskin mendapat jatah yang jauh lebih kecil. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan DOKA periode 2008-2018 mengungkap 16 rekomendasi senilai Rp32,25 miliar yang tidak ditindaklanjuti secara serius, hal ini

menjadi sebuah sinyal nyata lemahnya komitmen akuntabilitas di tata kelola pemerintahan Aceh di berbagai tingkatan (Putra & Amran, 2023). Di sisi lain, proses Musrenbang sebagai arena perencanaan partisipatif sering terdegradasi menjadi ritual administratif yang tidak benar-benar menyerap aspirasi masyarakat, sehingga program yang dirancang kerap meleset dari kebutuhan nyata rakyat miskin (Islami, 2025). Rangkaian kelemahan ini menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang bertumpu pada dominasi birokrasi dan ketergantungan fiskal saja sudah sampai pada batas kemampuannya.

Keterbatasan model pembangunan konvensional yang bersifat hierarkis dan sentralistik mendorong munculnya kebutuhan akan pendekatan yang lebih terbuka dan melibatkan banyak pihak. *Collaborative governance* hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. (Ansell & Gash, 2008) mendefinisikannya sebagai pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, deliberatif, dan berorientasi pada konsensus. Konsep ini bertolak dari pengakuan bahwa permasalahan publik yang kompleks, apa yang oleh para ahli disebut sebagai *wicked problems*, memerlukan kapasitas dan sumber daya yang melampaui kemampuan satu aktor tunggal (Kelvin et al., 2022). Kepercayaan (*trust*), dialog tatap muka yang berkelanjutan, dan komitmen terhadap proses merupakan prasyarat yang tidak bisa diabaikan agar kolaborasi ini menghasilkan kebijakan yang efektif (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks Aceh, kerangka ini menjadi relevan karena ia menawarkan cara untuk mendayagunakan keragaman aktor dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, hingga ada juga lembaga adat dalam satu ekosistem tata kelola pemerintahan.

Dalam *collaborative governance* (Bryson et al., 2006) mengembangkan kerangka kerja tentang *cross-sector collaboration* yang menekankan bahwa pemerintah perlu merancang forum dan struktur kolaborasi secara sengaja, bukan hanya mengandalkan partisipasi insidental. Pendekatan ini menempatkan kolaborasi sebagai alat desain kebijakan dan tata kelola, di mana aktor dari berbagai sektor menggabungkan sumber daya, informasi, kegiatan, dan kapabilitas untuk mencapai hasil bersama yang lebih efektif dan berkelanjutan. Secara substansial, Bryson menggarisbawahi beberapa dimensi penting yaitu: *Initial conditions*, faktor pemicu seperti turbulensi lingkungan, kegagalan sektor tunggal (*sector failure*), dan pendahulu langsung (*conveners*, kesepakatan masalah, jaringan *existing*); *Process components*, tahapan seperti *forging agreements*, *building leadership/legitimacy/trust*, *managing conflict*, dan *planning (deliberate/emergent)*; *Structure and governance*, konfigurasi keanggotaan, struktur formal/informal, dan mekanisme tata kelola (*self-governing*, *lead organization*, *network admin*); *Contingencies and Constraints*, jenis kolaborasi, *power imbalances*, *competing institutional logics*; *Outcomes, public value, effect first/second/third order, resilience/reassessment*; *Accountabilities, tracking inputs/proses/outputs, results management*, dan hubungan dengan konstituen politik/profesional.

Salah satu model kolaborasi yang paling banyak diterapkan dalam konteks pembangunan ekonomi daerah adalah model *Triple Helix* yang dikembangkan oleh (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Model ini memosisikan tiga aktor sebagai pilar utama ekosistem inovasi regional: Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator yang menetapkan kerangka hukum serta menyediakan infrastruktur pendukung; Akademisi (Perguruan Tinggi) berperan sebagai penghasil pengetahuan, riset terapan, dan sumber daya manusia yang terampil; serta Industri (Sektor Swasta) berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi melalui investasi, penyerapan tenaga kerja, dan inovasi produk (Mujiansyah, 2024). Interaksi intensif di antara ketiga aktor ini diyakini mampu mengubah potensi lokal menjadi nilai tambah ekonomi yang inklusif. Di Aceh, pemerintah provinsi diharapkan tampil sebagai fasilitator ekosistem inovasi, akademisi dari institusi seperti Universitas Syiah Kuala dan Universitas Malikussaleh diposisikan sebagai penyedia masukan ilmiah bagi kebijakan daerah, sementara sektor industri melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* diharapkan menciptakan program pemberdayaan yang bermakna dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal (Muksalmina et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah memetakan berbagai aspek persoalan kemiskinan dan kolaborasi pembangunan di Aceh. (Tassya & Nailufar, 2024) membuktikan secara statistik bahwa DOKA

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan Aceh, dengan koefisien regresi sebesar -13,189. Temuan ini menegaskan posisi DOKA sebagai instrumen pembangunan utama, sekaligus menunjukkan bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pengelolaan dan transparansi alokasi. (Islami, 2025) menelaah implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat dan mendapati bahwa penurunan angka kemiskinan dari 17,25 % tahun 2020 menjadi 15,68 % tahun 2023, berjalan bersamaan dengan hambatan serius seperti transparansi yang rendah, koordinasi antar-instansi yang tumpang tindih, dan pelibatan masyarakat yang hanya bersifat seremonial. (Muksalmina et al., 2025) meneliti program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang mempertemukan pemerintah, PT Pupuk Iskandar Muda, dan akademisi, dan menemukan bahwa model pemberdayaan berbasis pemetaan kebutuhan lokal yang partisipatif terbukti meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat sekitar perusahaan. (Radhiyati, 2020) mengkaji hambatan kerja sama pembangunan antardaerah dalam program Basajan (Banda Aceh, Sabang, Jantho) dan menunjukkan bahwa kesepakatan formal antarkepada daerah sering terurai ketika terjadi pergantian kepemimpinan politik, kekurangan tenaga profesional koordinasi, dan menguatnya ego kewilayahan.

Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan pemahaman yang berharga, namun sebagian besar berfokus pada evaluasi fiskal dan program sektor tertentu. Studi yang secara khusus dan luas membedah tantangan operasional model *Triple Helix* sebagai kerangka *collaborative governance* dalam konteks pengentasan kemiskinan di Aceh terutama dalam periode pasca-pandemi dan menjelang berakhirnya skema DOKA masih sangat terbatas. (Hariadi, 2024) dalam penelitiannya di Kabupaten Aceh Tamiang mengidentifikasi bahwa lemahnya kepemimpinan fasilitatif, absennya kebijakan inovatif dari pimpinan daerah, dan ketidakmampuan mengintegrasikan data kemiskinan lintas sektor merupakan akar dari kegagalan kolaborasi. Temuan tersebut mengarahkan perhatian pada dimensi kelembagaan dan manajerial yang sering luput dari kajian berbasis data fiskal semata. Celah inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), yaitu metode kajian pustaka yang dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi dengan tujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis temuan-temuan dari berbagai studi relevan yang telah ada sebelumnya (Snyder, 2019). Berbeda dengan *narrative review* yang bersifat deskriptif dan tidak terstruktur, SLR menerapkan protokol yang ketat mulai dari perumusan pertanyaan penelitian, penentuan strategi pencarian, penetapan kriteria inklusi dan eksklusi, hingga proses sintesis temuan secara analitis (Agustina et al., 2025).

Pilihan atas metode SLR dalam penelitian ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, kompleksitas permasalahan *collaborative governance* berbasis *Triple Helix* dalam konteks pengentasan kemiskinan memerlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap lanskap konseptual dan empiris yang sudah berkembang di berbagai konteks. Kedua, pendekatan ini memungkinkan identifikasi kesenjangan riset (*research gap*) secara terstruktur, yang menjadi fondasi logis bagi kontribusi orisinal penelitian ini. Ketiga, sebagaimana ditegaskan oleh (Maylinda & Agyansa, 2025). SLR memiliki keunggulan dalam menyediakan basis pengetahuan yang kumulatif bagi pengambil kebijakan, sehingga sangat sesuai dengan orientasi penelitian kebijakan publik.

Analisis data dilakukan menggunakan *thematic synthesis* yang dikembangkan oleh Thomas & Harden tahun 2008. Metode ini terdiri dari tiga langkah: (1) pengkodean teks bebas (*free-line coding*) terhadap temuan-temuan dari setiap artikel; (2) pengelompokan kode-kode tersebut ke dalam tema-tema deskriptif; serta (3) pengembangan tema-tema analitik yang melampaui isi literatur untuk menghasilkan inferensi baru yang relevan dengan pertanyaan penelitian (Maghfiroh et al., 2022).

PEMBAHASAN

Initial Conditions Collaborative Governance di Aceh

Aceh menghadapi turbulensi lingkungan berlapis yang menjadi kondisi awal mendorong terbentuknya kebutuhan atas *collaborative governance*. Pertama, warisan konflik bersenjata berkepanjangan (1976-2005) meninggalkan kerusakan struktural pada kapasitas pemerintahan daerah dan jaringan sosial ekonomi masyarakat. Kedua, bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2004 meluluhlantakkan infrastruktur fisik, sosial, dan kelembagaan secara masif. Ketiga, pandemi COVID-19 (2020-2021) membalikkan capaian penurunan kemiskinan yang telah dicapai sebelumnya, dengan angka kemiskinan nasional melonjak ke 10,14% pada Maret 2021 (BPS, 2021), sementara Aceh yang posisi awalnya sudah rapuh mengalami dampak yang lebih dalam. Keempat, menjelang berakhirnya skema Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada tahun 2027, muncul ketidakpastian fiskal, yang oleh beberapa analis disebut sebagai *fiscal cliff*, memaksa seluruh aktor untuk memikirkan model tata kelola yang lebih berkelanjutan (Davig & Foerster, 2019). Beberapa keadaan yang berlapis ini, secara kolektif menciptakan tekanan lingkungan yang tidak dapat diatasi oleh satu aktor tunggal, sehingga menjadi pendorong objektif bagi kebutuhan kolaborasi multi-aktor (Ansell & Gash, 2008).

Data makro kemiskinan Aceh berikut di bawah ini menggambarkan secara konkret paradoks fiskal yang menjadi latar keadaan tersebut. Meskipun persentase kemiskinan menunjukkan arah menurun, kualitas kemiskinan yang tersisa justru semakin memburuk, sebagaimana tercermin dari meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dalam periode yang sama.

Tabel 1: Indikator Kondisi Kemiskinan Provinsi Aceh 2024-2025

Indikator Ekonomi dan Kemiskinan	Maret 2024	September 2024	September 2025	Proyeksi 2025
Persentase Penduduk Miskin (%)	14,23	12,64	12,22	12,22
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	806.530	718.960	703.330	710.000
Tingkat Kemiskinan Perkotaan (%)	9,60	8,37	8,15	8,10
Tingkat Kemiskinan Perdesaan (%)	16,75	14,99	14,51	14,50
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,836	2,055	2,055	2,10
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,420	0,523	0,523	0,55

Sumber: (BPS Aceh, 2025) diolah, 2026.

Berdasarkan data literatur menunjukkan bahwa pendekatan sektoral tunggal secara konsisten gagal mengatasi kemiskinan di Aceh. Dari sisi pemerintah, meskipun aliran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) mengalir triliunan rupiah setiap tahun sejak 2008, angka kemiskinan Aceh tetap menjadi yang tertinggi di pulau Sumatera. Temuan BPK mengungkap 16 rekomendasi senilai Rp32,25 miliar yang tidak ditindaklanjuti, mengindikasikan kegagalan akuntabilitas yang sistemik (Putra & Amran, 2023). Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) memang telah terbentuk di seluruh provinsi dan 92% kabupaten/kota, namun kinerjanya dalam sinkronisasi program dinilai belum optimal (LP2KD Aceh Jaya, 2019).

Proses musrenbang yang seharusnya menjadi arena perencanaan partisipatif terdegradasi menjadi ritual administratif tanpa nilai yang jelas (Islami, 2025). Dari sisi industri, sektor swasta beroperasi secara parsial tanpa integrasi ke dalam ekosistem pembangunan daerah, sehingga program CSR belum optimal menjangkau kelompok termiskin secara sistematis. Dari sisi akademisi, riset perguruan tinggi lokal seperti Universitas Syiah Kuala dan Universitas Malikussaleh dan lainnya belum terserap secara maksimal ke dalam formulasi kebijakan daerah, pihak akademisi dari USK sering kali hanya diposisikan sebagai

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

366

Indexed



“tukang stempel” kebijakan riset daripada mitra dialog strategis. Kegagalan ketiga sektor secara simultan ini, dalam perspektif Triple Helix, mengindikasikan tidak hadirnya sinergi yang fungsional dan menjadi argumen kuat bagi perlunya rekonfigurasi kolaboratif.

Kajian literatur mengidentifikasi sejumlah pendahulu langsung yang membentuk kondisi pra-kolaborasi di Aceh. Dalam hal *conveners*, pemerintah provinsi Aceh menjalankan peran formal melalui instrumen regulasi seperti Qanun Aceh, sementara lembaga-lembaga non-pemerintah pascakonflik dan pasca-tsunami bertindak sebagai fasilitator jaringan lintas aktor. Program CSR PT Pupuk Iskandar Muda yang menggandeng pemerintah dan akademisi lokal merupakan contoh konkret bagaimana aktor industri dapat berperan sebagai *convener* (Muksalmina et al., 2025). Dalam hal kesepakatan masalah, terdapat konsensus luas di antara aktor bahwa persistensi kemiskinan Aceh bukan semata persoalan fiskal, melainkan persoalan tata kelola lintas sektor. Sementara itu, jaringan eksisting yang diidentifikasi meliputi jaringan antar perguruan tinggi negeri di Aceh, forum komunikasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan pemerintah, serta jaringan lembaga adat gampong yang secara tradisional memainkan peran mediasi sosial di tingkat komunitas. Namun demikian, penelitian (Wahyuni & Sari, 2025) terhadap menyatakan bahwa *network eksisting* berbasis kesepakatan antarkepala daerah rentan terurai saat terjadi pergantian kepemimpinan politik, sehingga keberlangsungan *network* (jaringan) sangat bergantung pada proses pelembagaan yang melampaui peran figur personal. Oleh karena itu, kondisi awal kolaborasi di Aceh ditandai oleh perpaduan antara urgensi fiskal, kegagalan birokrasi, dan kebutuhan mendesak akan inovasi sosial.

Process Components Collaborative Governance di Aceh

Proses kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan di Aceh merupakan sebuah sirkuit interaksi yang dinamis, melibatkan tahapan penempaan kesepakatan (*forging agreements*), pembangunan kepemimpinan fasilitatif, peningkatan legitimasi publik, serta manajemen konflik kepentingan. Dalam konteks Aceh, proses ini sering kali dimulai dari forum formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan rapat koordinasi TKPK, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas dialog tatap muka dan komitmen para pemimpin kunci (Sitorus & Utami, 2023). Penempaan kesepakatan di Aceh menghadapi tantangan besar berupa ketidaksinkronan data. Tanpa pemahaman bersama yang solid mengenai siapa dan di mana penduduk miskin berada, kesepakatan program sering kali meleset dari sasaran. Upaya untuk membangun kesepakatan berbasis data tunggal (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS) masih sering terganjal oleh rendahnya akurasi data di tingkat gampong (Al-Kautsar & Lukman, 2025). Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam proses perencanaan, baik yang bersifat sengaja (*deliberate*) dalam dokumen rencana pembangunan maupun yang muncul secara tiba-tiba (*emergent*) sebagai respon terhadap krisis seperti dampak pasca-pandemi atau bencana alam (Sarosa et al., 2024)

Pembangunan kepemimpinan dan legitimasi merupakan pilar krusial dalam proses kolaborasi. Di Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Tamiang, penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin daerah untuk menjadi fasilitator lintas sektor (Hariadi, 2024). Namun, sering kali ditemukan adanya defisit kepemimpinan fasilitatif di tingkat provinsi, di mana pendekatan yang digunakan masih bersifat direktif-hierarkis. Hal ini berakibat pada rendahnya *ownership* atau rasa memiliki dari pihak akademisi dan sektor swasta terhadap program pemerintah (Putri et al., 2025). Legitimasi kolaborasi di mata masyarakat sering sekali juga masih lemah karena keterlibatan warga biasanya hanya bersifat seremonial dalam forum forum diskusi tanpa dampak nyata pada peningkatan pendapatan mereka (Ishak & Hos, 2025).

Riyanto & Alfirdaus (2024) menyebutkan bahwa manajemen konflik menjadi aspek yang paling sering menjadi tantangan dalam *collaborative governance*, terutama terkait dengan pembagian sumber daya. Konflik kepentingan antara pemerintah provinsi yang ingin mempertahankan kontrol atas 60% DOKA dan pemerintah kabupaten/kota yang menuntut porsi lebih besar (misalnya wacana 80:20) sering sekali menghambat jalannya proses kolaborasi. Selain itu, terdapat konflik logika institusional di mana

birokrasi mengutamakan penyerapan anggaran tepat waktu, akademisi mengutamakan kebenaran metodologis, dan industri mengutamakan efisiensi program CSR (Khalis, 2025). Jika konflik ini tidak dikelola dengan baik melalui dialog yang berkelanjutan, kolaborasi hanya akan menjadi sekumpulan program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi.

(Andriani, 2022) juga menyatakan bahwa membangun kepercayaan (*trust building*) merupakan hal yang tidak kalah penting dalam sebuah proses *collaborative governance* karena dengan membangun kepercayaan juga proses jangka panjang yang memerlukan transparansi total. Lemahnya kontrol publik terhadap penggunaan DOKA dan temuan BPK mengenai ketidakpatuhan administrasi telah mengikis kepercayaan di antara para mitra kolaborasi (Sitorus & Utami, 2023). Untuk memulihkan kepercayaan ini, beberapa daerah mulai mengadopsi teknologi digital untuk memantau progres program pengentasan kemiskinan secara *real-time*, meskipun implementasinya masih terbatas (Riyanto, 2025).

Adapun elemen-elemen penting yang diperlukan untuk memperkuat proses kolaborasi di Aceh adalah pertama, meningkatkan intensitas dialog tatap muka yang bernilai antar aktor sehingga akan mengurangi kesalahpahaman kedepannya; kedua, menurunkan ego antar aktor dalam jaringan sehingga lebih mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara keseluruhan, komponen proses di Aceh masih didominasi oleh mekanisme formal yang kaku. Transformasi menuju proses kolaborasi yang lebih organik dan deliberatif memerlukan kerendahan hati birokrasi untuk mendengarkan masukan kritis dari akademisi dan fleksibilitas untuk bekerja sama dengan logika efisiensi sektor industri. Tanpa perbaikan pada proses ini, struktur kolaborasi yang megah sekalipun tidak akan mampu menghasilkan perubahan signifikan bagi rakyat miskin.

Structure and Governance di Aceh

Struktur tata kelola kolaboratif di Aceh dibangun di atas pondasi regulasi otonomi khusus yang memberikan kekuasaan besar kepada pemerintah daerah. Namun, dalam perspektif *Triple Helix*, struktur ini harus dievaluasi berdasarkan bagaimana ia memfasilitasi interaksi antara Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Industri. Saat ini, mekanisme tata kelola di Aceh cenderung menggunakan model *Lead Organization*, di mana Bappeda atau TKPK bertindak sebagai pemegang kendali tunggal atas sumber daya dan arah kebijakan (Khalis, 2025). *Lead organization* merupakan bentuk pengelolaan jaringan di mana proses interaksi dan koordinasi terpusat pada satu pihak yang berperan sebagai organisasi utama atau pemimpin. Dengan adanya pemusatan tersebut, para aktor dalam jaringan tidak lagi harus saling berhubungan secara langsung satu sama lain, melainkan cukup berinteraksi dengan organisasi yang menjadi pusat kepemimpinan. Namun, kelemahannya adalah potensi ketergantungan tinggi pada pemimpin serta berkurangnya interaksi horizontal antar anggota jaringan (Sakty, 2024). Lebih lanjut (Provan & Kenis, 2008) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa model *Lead Organization* paling relevan dalam jangka pendek, tetapi paling rentan terhadap dominasi aktor tunggal yang pada akhirnya mengurangi legitimasi dan komitmen mitra lain. Kondisi inilah yang terjadi di Aceh, Bappeda memiliki legitimasi formal dan fiskal, tetapi cara penggunaan otoritas tersebut menciptakan subordinasi pada pihak akademisi dan industri, bukan kemitraan sejati.

Demikian dari itu, konfigurasi keanggotaan dalam ekosistem penanggulangan kemiskinan melibatkan beragam aktor dengan tingkat kekuasaan dan kepentingan yang berbeda. Jika dilihat berdasarkan analisis menggunakan Matriks Mendelow (*power*) menunjukkan bahwa aktor kunci (*key players*) adalah Pemerintah Provinsi dan DPRA, sementara pihak akademisi dan sektor swasta sering kali berada di kuadran *Keep Informed*, yang berarti mereka memiliki kepentingan tinggi tetapi kekuasaan yang terbatas dalam memengaruhi keputusan akhir anggaran DOKA (Khalis, 2025). Kondisi ini menciptakan struktur yang asimetris, di mana kolaborasi tidak berjalan sebagai kemitraan sejajar melainkan sebagai hubungan subordinasi birokratis. Penjelasan ini sejalan dengan pendapat (Aivalli et al., 2025) yang menyatakan bahwa dalam praktik *collaborative governance*, ketimpangan kekuasaan secara signifikan membentuk hierarki dalam pengambilan keputusan, sehingga aktor yang lebih dominan cenderung

mengontrol arah kolaborasi dan menempatkan aktor lain dalam posisi yang lebih rendah.

Secara struktural ini menghambat terbentuknya *network governance* yang ideal, yang seharusnya menekankan interaksi horizontal, berbagi pengetahuan, dan *co-creation* antar pemerintah, akademisi, dan sektor industri. Dalam konteks ini, struktur governance di Aceh belum sepenuhnya berfungsi sebagai arena kolaboratif, melainkan masih menyerupai perpanjangan birokrasi formal dengan pendekatan *top-down*. Analisis ini sejalan dengan (Wulandjani, 2025) yang menyatakan bahwa meskipun terdapat upaya membangun kolaborasi multi-aktor, banyak daerah di Indonesia praktiknya masih didominasi oleh pendekatan birokratis yang bersifat hierarkis. Forum kolaborasi yang dibentuk cenderung menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Kondisi ini menghambat pertukaran pengetahuan secara setara antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Dalam konteks di Aceh, (Mardhiah, 2022) menunjukkan bahwa jaringan kebijakan yang terbentuk dalam berbagai sektor pembangunan masih bersifat elitis dan terpusat pada aktor pemerintah. Akademisi dan masyarakat sipil di Aceh memang dilibatkan, tetapi lebih sebagai pelengkap legitimasi daripada sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur *governance* belum bertransformasi menjadi *network governance*, melainkan masih mempertahankan karakter *state-centric*. Akibatnya, kolaborasi yang terjadi tidak menghasilkan integrasi pengetahuan yang kuat, melainkan sekadar koordinasi administratif.

Tabel 2: Pemetaan Peran Aktor Triple Helix dalam Tata Kelola Pengentasan Kemiskinan di Aceh

Aktor	Peran Formal dalam Tata Kelola	Kontribusi Strategis	Tantangan Struktural
Pemerintah	Regulator, penyedia anggaran (DOKA), koordinator (TKPK)	Menetapkan hukum dan infrastruktur pendukung	Birokrasi rumit, korupsi, ego sektoral
Akademisi	Evaluator kebijakan, analisis kebijakan, inovator sosial	Riset terapan, pemetaan kebutuhan lokal, SDM terampil	Kurangnya insentif, riset sering diabaikan birokrasi
Industri	Pelaksana CSR, penyedia lapangan kerja, investor	Pemberdayaan ekonomi, inovasi produk lokal, efisiensi	Logika profit vs sosial, program sering tidak terintegrasi

Sumber: (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Hariadi, 2024; Khalis, 2025); diolah, 2026

Transformasi struktur *governance* di Aceh perlu diarahkan pada penguatan model kolaborasi yang lebih partisipatif dan terdistribusi. Pergeseran dari *lead organization* menuju bentuk *shared governance* atau *network administrative organization* menjadi penting untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antar aktor (Jang & Valero, 2022). Dalam hal ini, pemberian mandat formal kepada perguruan tinggi untuk mengelola data dan analisis kebijakan, serta penciptaan insentif struktural bagi sektor industri untuk terlibat aktif dalam program pengentasan kemiskinan, dapat menjadi langkah strategis. Dengan demikian, struktur *collaborative governance* berfungsi sebagai mekanisme koordinasian juga sebagai ekosistem yang mendorong inovasi, inklusivitas, dan keberlanjutan kolaborasi lintas sektor di Aceh.

Contingencies and Constraints di Aceh

Indikator dan hambatan (*contingencies and constraints*) merupakan variabel yang menentukan bagaimana struktur dan proses kolaborasi harus menyesuaikan diri dengan realitas lapangan (Li et al., 2023). Dalam konteks Aceh, hambatan ini sering kali muncul dalam bentuk birokrasi yang kaku, lingkungan politik yang terfragmentasi, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah (Ansell & Gash, 2008). Sebaliknya, kontinjensi dapat berupa peluang unik seperti keberadaan lembaga adat yang kuat atau mandat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

369

Indexed



hukum otonomi khusus yang memberikan fleksibilitas regulasi (Nurliana, 2025). Dengan itu, keberhasilan *collaborative governance* dalam model apapun termasuk *triple helix* untuk upaya pengentasan kemiskinan di Aceh sangat bergantung pada kemampuan para aktor di jaringan menavigasi berbagai faktor kontingensi dan batasan institusional. Batasan ini bersifat teknis dan juga bersifat sistemik, mencakup ketidakseimbangan kekuasaan (*power imbalances*), logika institusional yang bertentangan, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal (Nuradhawati, 2026).

Tabel 3: Pemetaan *Contingencies and Constraints* di Aceh

Dimensi	Komponen Utama dalam Konteks Aceh	Implikasi Terhadap Hasil Kolaborasi
Kontingensi Lingkungan	Sejarah konflik GAM-RI, pemulihan pasca-tsunami, dan penerapan Syariat Islam.	Menentukan tingkat kepercayaan (<i>trust</i>) awal dan orientasi nilai para aktor.
Asimetri Kekuasaan	Dominasi elit politik lokal vs. komunitas adat dan organisasi non-pemerintah.	Berisiko menyebabkan marginalisasi suara masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Hambatan Fiskal	Ketergantungan pada Dana Otsus dan keterbatasan PAD (Pendapatan Asli Daerah).	Membatasi keberlanjutan program kolaboratif jangka panjang.
Logika Institusional	Pertentangan antara birokrasi modern, hukum nasional, dan nilai-nilai Qanun.	Menciptakan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan.

Sumber: (Barron et al., 2013; Mutch, 2018; Purdy, 2012), diolah, 2026.

Sejarah Aceh yang panjang ditandai oleh konflik bersenjata dan bencana alam dahsyat seperti gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004. Peristiwa ini telah menyebabkan trauma psikologis pada masyarakat, khususnya remaja, yang dampaknya masih terasa dan memerlukan penanganan profesional (Hutagalung et al., 2013). Kondisi trauma ini menjadi kontingensi penting yang dapat memengaruhi partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam proses kolaborasi. Selain itu, pemerintahan di Aceh didesain untuk selaras dengan prinsip-prinsip Syariat Islam melalui Qanun, yang mencakup hukum pidana, ekonomi syariah, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan (Mulia & Zakki, 2021). Kerangka hukum dan budaya yang unik ini merupakan kontingensi struktural yang membentuk landasan dan batasan bagi *collaborative governance* di Aceh, menuntut upaya harmonisasi dengan hukum nasional dan hak asasi manusia (Pradana et al., 2024). Di tingkat desa, seperti di Aceh Barat, manifestasi akuntabilitas dapat bersifat kontingen, bergantung pada berbagai faktor termasuk keterbatasan hak Pejabat Sementara/Pjs (Tjoetra et al., 2025)).

Salah satu kendala signifikan adalah rendahnya kemandirian keuangan daerah. Contohnya, di Kabupaten Aceh Tamiang, derajat desentralisasi keuangan masih relatif rendah, menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada bantuan pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Syahputra, 2017). Ketergantungan finansial ini membatasi otonomi daerah dan kemampuan untuk mandiri dalam membiayai inisiatif kolaborasi lokal. Studi tentang Dana Otonomi Khusus di Aceh, yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan pendidikan, belum menunjukkan korelasi yang kuat dengan penurunan angka kemiskinan atau peningkatan partisipasi pendidikan jenjang SMP (Budiratna & Qibthiyah, 2020). Hal ini mengindikasikan adanya kontingensi terkait efektivitas transfer dana khusus sebagai alat pembangunan. Upaya *collaborative governance* dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, seperti di Kabupaten Aceh Utara, juga belum sepenuhnya efektif, dengan kondisi awal yang belum jelas menjadi salah satu penghambat (Al-Kautsar & Lukman, 2025).

Implementasi *collaborative governance* di Aceh seringkali terhambat oleh masalah kelembagaan dan keterbatasan sumber daya. Berdasarkan *literature review* tentang *collaborative governance* di berbagai konteks mengidentifikasi kurangnya komitmen yang kuat, kepercayaan antar pemangku kepentingan, aturan resmi yang memayungi kolaborasi, serta akses sumber daya (anggaran dan prasarana) yang terbatas sebagai kendala utama (Elianda & Rahmawati, 2020). Contohnya, di Kota Banda Aceh, efektivitas pemanfaatan teknologi informasi berbasis *e-commerce* pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkendala oleh rendahnya dukungan pemerintah dan kurangnya pemahaman sumber daya manusia terkait teknologi canggih (Kusuma et al., 2020). Dalam konteks penguatan kapasitas kelembagaan, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, kepemimpinan kolaboratif diperlukan untuk mengatasi keterbatasan yang ada (Ramadani, 2024). Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara juga menghadapi keterbatasan, dan gaya kepemimpinan di sana bersifat kontingen, bergantung pada kondisi spesifik (Desky, 2023).

Berikut adalah analisis faktor yang memengaruhi kolaborasi di Aceh:

- Jenis kolaborasi: masih bersifat koordinasi fungsional daripada kolaborasi integratif. Para aktor berbagi informasi tetapi jarang berbagi sumber daya secara mendalam (Taufik & Said, 2023).
- Asimetri informasi: pemerintah memiliki akses data yang luas tetapi sering kali bersifat tertutup, sementara akademisi memiliki alat analisis yang tajam tetapi kekurangan akses terhadap data primer pemerintahan (Al-Kautsar & Lukman, 2025).
- Ketergantungan jalur (*path dependency*): Budaya birokrasi pasca-konflik yang cenderung sentralistik dan kurang transparan masih menjadi hambatan bagi terciptanya budaya kolaborasi yang terbuka (Barron et al., 2013).
- Tekanan eksternal: kebijakan pemerintah pusat, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024, memaksa daerah untuk mengubah mekanisme pengelolaan DOKA, yang sering kali menimbulkan kebingungan administratif di tingkat lokal (Siregar, 2024).

Untuk mengatasi batasan ini, diperlukan pembentukan protokol kolaborasi yang melintasi batas-batas institusional. Hal ini mencakup pembuatan aturan main (*rules of engagement*) yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap aktor di dalam jaringan, serta penyediaan *buffer* atau penengah profesional yang mampu menjembatani perbedaan logika antara birokrat, akademisi, dan pengusaha. Tanpa adanya upaya kesadaran untuk menyeimbangkan kekuasaan dan menyelaraskan logika, kolaborasi di Aceh akan terus terjebak dalam siklus inefisiensi.

Outcomes & Accountabilities di Aceh

Emerson, Nabatchi, dan Balogh pada tahun 2012 mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan serta manajemen kebijakan publik yang melibatkan orang-orang secara lintas batas dari instansi publik, tingkat pemerintahan, dan/atau sektor publik, swasta, dan sipil untuk mencapai tujuan publik (Emerson et al., 2012). Dalam model ini, *outcomes* tidak sekadar dipandang sebagai output administratif, melainkan sebagai dampak pada tingkat populasi dan perubahan kondisi mendasar yang selama ini mengunci masalah-masalah kompleks atau *wicked problems*.

Akuntabilitas dalam sistem kolaboratif mengalami pergeseran dasar dari model bilateral-vertikal menuju model multilateral-horizontal (Lee & Ospina, 2022). Jika dalam birokrasi tradisional seorang bawahan hanya bertanggung jawab kepada atasan (vertikal), dalam kolaborasi, aktor-aktor harus saling bertanggung jawab satu sama lain (horizontal) dan kepada publik yang lebih luas (eksternal). Mekanisme ini melibatkan tiga dimensi utama yaitu informasi (penyediaan data), diskusi (justifikasi tindakan), dan konsekuensi (pemberian sanksi atau penghargaan). Di Aceh, tantangan muncul ketika struktur formal akuntabilitas yang dirancang melalui regulasi sering kali berbenturan dengan praktik kekuasaan asimetris dan fragmentasi kepentingan di lapangan (Nurliana et al., 2025).

Pemerintah berkontribusi melalui regulasi (Qanun, RPJMD), anggaran (DOKA, DAK, APBD), dan infrastruktur kelembagaan. Akademisi berkontribusi melalui penelitian terapan, pengembangan model

pemberdayaan berbasis bukti, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Industri berkontribusi melalui program CSR, penciptaan lapangan kerja, dan investasi dalam rantai nilai lokal. Dari sisi proses, forum Musrenbang, rapat koordinasi SKPD, dan kemitraan proyek-spesifik menjadi arena utama interaksi lintas jaringan. Dari sisi *outputs* yang terukur, angka kemiskinan Aceh turun dari 14,23% (Maret 2024) menjadi 12,22% (September 2025) (BPS Aceh, 2025). sebuah perbaikan yang patut diapresiasi. Namun demikian, memburuknya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 1,836 menjadi 2,055 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari 0,420 menjadi 0,523 dalam periode yang sama mengindikasikan bahwa output kuantitatif (penurunan persentase) tidak berbanding lurus dengan kualitas capaian (pengurangan kesenjangan di antara kelompok miskin itu sendiri). Ketimpangan antara output agregat dan *outcome* kualitatif ini adalah sinyal paling jelas tentang ketidakefektifan tata kelola kolaboratif yang ada.

Sistem manajemen hasil (*results management*) dalam *collaborative governance* untuk pengentasan kemiskinan di Aceh menghadapi tiga defisit utama yang teridentifikasi dari kajian literatur. Pertama, defisit data terpadu yaitu tidak adanya sistem informasi kemiskinan yang terintegrasi lintas jaringan menyebabkan setiap aktor beroperasi dengan data parsial yang seringkali tidak kompatibel satu sama lain, kelemahan ini yang secara eksplisit diidentifikasi oleh (Hariadi, 2024). Kedua, defisit akuntabilitas horizontal yaitu mekanisme pertanggungjawaban yang ada bersifat vertikal (instansi ke pimpinan), bukan horizontal (aktor ke aktor dalam jaringan kolaborasi), sehingga tidak ada insentif institusional bagi masing-masing aktor untuk melaporkan dan belajar dari kegagalan bersama. Ketiga, defisit pembelajaran organisasional yaitu tidak ada mekanisme evaluasi bersama yang memungkinkan setiap heliks merefleksikan efektivitas kontribusinya dan menyesuaikan strategi secara adaptif.

Dari sisi hubungan dengan konstituen, terdapat perbedaan mencolok antara akuntabilitas kepada konstituen politik (yang berorientasi elektoral jangka pendek) dan akuntabilitas kepada konstituen profesional (yang berorientasi pada standar kualitas dan dampak jangka panjang). Meskipun Pemerintah Aceh berhasil meraih opini WTP dari BPK selama 10 kali berturut-turut (DPRA, 2025). sebuah capaian administratif yang patut diapresiasi, namun opini tersebut hanyalah akuntabilitas formal atas laporan keuangan, bukan akuntabilitas substantif atas efektivitas pengentasan kemiskinan. Realisasi APBA yang mencapai lebih dari 95% secara administratif tidak berbanding lurus dengan dampak ekonomi di lapangan. Banyak hasil riset dari Universitas Syiah Kuala mengenai kemiskinan di Aceh hanya berakhir sebagai dokumen di rak perpustakaan tanpa diintegrasikan ke dalam program kerja dinas terkait. (Haris et al., 2024) dalam kajian implementasi SDGs menegaskan bahwa keberlanjutan program pengentasan kemiskinan sangat ditentukan oleh kualitas sistem akuntabilitas yang melampaui siklus politik semata.

Tantangan Utama Collaborative Governance Berbasis Triple Helix Dalam Upaya Penurunan Angka Kemiskinan di Provinsi Aceh

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat dipahami bahwa yang menjadi tantangan utama *collaborative governance* berbasis *triple helix* dalam upaya penurunan angka kemiskinan di provinsi Aceh adalah masih terdapat dominasi birokrasi dan asimetri kekuasaan, tata kelola yang berlaku saat ini cenderung menggunakan model *lead organization*, di mana Bappeda atau Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) bertindak sebagai pemegang kendali tunggal atas sumber daya dan arah kebijakan. Kondisi ini menciptakan struktur kekuasaan yang asimetris, di mana kolaborasi tidak berjalan sebagai kemitraan sejajar, melainkan sebagai hubungan subordinasi birokratis. Masih lemahnya kepemimpinan fasilitatif, penelitian di kabupaten di Aceh seperti Aceh Barat dan Aceh Tamiang konsisten menunjukkan adanya defisit kepemimpinan fasilitatif di tingkat provinsi. Pendekatan yang digunakan oleh pimpinan daerah masih bersifat direktif-hierarkis, yang berakibat pada rendahnya rasa memiliki (*ownership*) dari pihak akademisi dan sektor swasta terhadap program-program pemerintah.

Lebih lanjut, adanya konflik logika institusional dan kepentingan antar aktor, dalam model *Triple Helix* pemerintah, akademisi, dan swasta beroperasi dengan logika institusional yang berbeda-beda dan kerap bertentangan satu sama lain. Birokrasi mengutamakan penyerapan anggaran yang tepat waktu,

akademisi mengutamakan kebenaran metodologis dan rigor ilmiah, sedangkan industri mengutamakan efisiensi dan dampak langsung dari program CSR. Konflik logika ini tidak hanya terjadi pada tataran nilai, tetapi juga meluas ke konflik kepentingan yang bersifat fiskal. Ketegangan antara pemerintah provinsi yang ingin mempertahankan kontrol atas 60% alokasi DOKA dan pemerintah kabupaten/kota yang menuntut porsi lebih besar sering kali menjadi hambatan nyata bagi terjalannya proses kolaborasi yang produktif. Kemudian masih rendahnya keterlibatan akademisi sebagai mitra strategis, Perguruan tinggi di Aceh, seperti Universitas Syiah Kuala dan Universitas Malikussaleh, sejatinya memiliki kapasitas riset dan analisis kebijakan yang sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan. Namun dalam praktiknya, pihak akademisi sering kali hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” kebijakan, bukan sebagai mitra dialog strategis. Banyak hasil riset yang relevan mengenai kemiskinan di Aceh hanya berakhir sebagai dokumen di rak perpustakaan tanpa pernah diintegrasikan ke dalam formulasi dan program kerja dinas terkait.

Ketidaksinkronan data dan lemahnya sistem informasi terpadu juga menjadi tantangan utama, karena fondasi dari setiap kesepakatan dalam proses kolaborasi adalah pemahaman bersama yang solid mengenai kondisi kemiskinan yang hendak diatasi. Namun, upaya membangun kesepakatan berbasis data tunggal melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih kerap terganjal oleh rendahnya akurasi data di tingkat gampong. Ketiadaan sistem informasi kemiskinan yang terintegrasi lintas jaringan menyebabkan setiap aktor beroperasi dengan data parsial yang seringkali tidak kompatibel satu sama lain. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam proses perencanaan dan membuat kesepakatan program sering kali meleset dari sasaran yang sesungguhnya.

Tantangan struktural yang tidak kalah penting adalah tingginya ketergantungan fiskal Aceh pada Dana Otonomi Khusus (DOKA) yang jadwal berakhirnya semakin dekat pada tahun 2027. Ketergantungan ini membatasi otonomi daerah dan kemampuan untuk secara mandiri membiayai inisiatif kolaborasi jangka panjang. Menjelang berakhirnya skema DOKA, muncul ketidakpastian fiskal yang oleh sejumlah analis disebut sebagai *fiscal cliff*, yang memaksa seluruh aktor untuk memikirkan model tata kelola yang lebih berkelanjutan. Ironisnya, meskipun triliunan rupiah DOKA telah mengalir sejak 2008, angka kemiskinan Aceh tetap menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera. Porsi besar dana selama ini mengalir ke proyek infrastruktur fisik berskala besar, sementara program pemberdayaan ekonomi langsung bagi kelompok termiskin mendapat alokasi yang jauh lebih kecil. Temuan BPK yang mengungkap 16 rekomendasi senilai Rp32,25 miliar yang tidak ditindaklanjuti memperkuat indikasi lemahnya komitmen akuntabilitas yang bersifat sistemik.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa tantangan persoalan kemiskinan di Aceh bukanlah semata-mata persoalan kekurangan anggaran, melainkan secara mendasar merupakan persoalan tata kelola lintas sektor yang belum mampu membangun ekosistem kolaborasi yang setara, deliberatif, dan berorientasi pada dampak nyata. Transformasi menuju *collaborative governance* yang sejati di Aceh membutuhkan pergeseran paradigmatis, dari dominasi *lead organization* menuju *shared governance*, dari akuntabilitas formal menuju akuntabilitas substantif, dan dari keterlibatan seremonial menuju kemitraan strategis yang menempatkan pemerintah, akademisi, dan industri sebagai mitra yang saling melengkapi dalam satu ekosistem inovasi sosial yang inklusif. Dengan demikian, kedepannya akan menghasilkan sebuah *collaborative governance* yang benar-benar efektif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Aceh.

REFERENSI

- Agustina, F., Syarif, A. M., Mulyanto, E., & Dolphina, E. (2025). Blockchain Untuk Pemerintahan Digital: Suatu Kajian Literatur Sistematis. *Integrative Research in Computer Science*, 1(01), 77-107.
- Aivalli, P., Dada, S., Gilmore, B., Srinivas, P. N., & De Brún, A. (2025). Power dynamics and intersectoral

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

373

Indexed



SINTA 4



- collaboration for health in low-and middle-income countries: a realist review. *Health policy and planning*, 40(6), 661-683. <https://doi.org/10.1093/heapol/czaf022>.
- Al-Kautsar, M. R., & Lukman, S. (2025). *Collaborative Governance Dalam Mengatasi Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Aceh Utara* (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Andriani, R. (2022). Proses Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1), 1-23.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Barron, P., Rahman, E., & Nugroho, K. (2013). The Contested Corners of Asia: Subnational Conflict and International Development Assistance. The Case of Aceh, Indonesia. In The Asia Foundation. <https://www.asiafoundation.org/resources/pdfs/AcehCaseStudyFullReport.pdf>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The design and implementation of Cross-Sector collaborations: Propositions from the literature. *Public administration review*, 66, 44-55. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>
- Budiratna, H., & Qibthiyah, R. M. (2020). Evaluasi atas transfer dana otonomi khusus di Aceh, Papua, dan Papua Barat. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(5), 332236.
- Davig, T., & Foerster, A. (2019). Uncertainty and fiscal cliffs. *Journal of Money, Credit and Banking*, 51(7), 1857-1887.
- Desky, H. (2023). The effect of compensation and motivation on performance employees at public works and spatial planning service of North Aceh. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(2), 495-504.
- Elianda, Y., & Rahmawati, D. E. (2020). Collaborative governance in HIV and AIDS prevention in Sleman District 2018. *J Gov Civ Soc*, 4(1), 99.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of public administration research and theory*, 22(1), 1-29.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). Dinamika inovasi: dari Sistem Nasional dan "Mode 2" ke Triple Helix hubungan universitas-industri-pemerintah. *Kebijakan penelitian*, 29 (2), 109-123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)
- Hariadi, M. (2024). *Kolaborasi pemerintahan dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten aceh tamiang* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Haris, A., Anas, A., Nurjaya, M., Iriawan, H., & Tang, M. (2024). Strategi dan Implementasi Kebijakan Program Sustainable Development Goals (SDGs) untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa. *Journal Homepage*, 10(1).
- Hutagalung, F., Hatta, K., & Ishak, Z. (2013). Trauma Remaja Korban Konflik Bersenjata Dan Tsunami Di Aceh: Trauma Among Adolescents Victim Of Armed Conflict And Tsunami In Aceh. *Psikologia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 8(1), 1-11.
- Ishak, N., & Hos, J. (2025). Dinamika Kelembagaan Lokal dan Partisipasi Warga dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis Komunitas. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 5(1), 58-70.
- Islami, R. A. (2025). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH (DOKA) DI KABUPATEN ACEH BARAT* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Izzah, U. (2024). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN GOWA* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Jang, H. S., & Valero, J. N. (2022). Managing collaborations and the network governance. In *Public-nonprofit collaboration and policy in homeless services: Management, measurement, and impact* (pp. 25-32). Cham: Springer International Publishing.
- Kelvin, K., Widianingsih, I., & Buchari, R. A. (2022). Kolaborasi Model Penta Helix Dalam Mewujudkan Smart Village Pondok Ranji. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan (J-3P)*, 7(2).

- Khalis, A. (2025). Analisis Pemangku Kepentingan Dana Otonomi Khusus Aceh dengan Matriks Pendekatan Mendelow. *Jurnal Masalah Administrasi, Pemerintahan, dan Politik*, 2 (2), 235–248. <https://doi.org/10.47134/jagpi.v2i2.4854>.
- Kusuma, H., Hakim, L., & Nugroho, A. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis E-Commerce Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Produk Pangan Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 5(4), 108-117.
- Lee, S., & Ospina, S. M. (2022). A framework for assessing accountability in collaborative governance: A process-based approach. *Perspectives on Public Management and Governance*, 5(1), 63-75.
- Li, L., Liu, H., Hou, X., Xu, J., Qin, T., & Xiong, H. (2023). The relationship between subject value perception and behavior coordination in air pollution collaborative governance: A multiple-step multiple mediator model. *Polish Journal of Environmental Studies*, 32(3), 2199-2210. [10.15244/pjoes/158769](https://doi.org/10.15244/pjoes/158769).
- Macella, A. D. R., Najamudin, N., Handayani, S. W., & Juraida, I. (2021). Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Aceh Kreatif Untuk Mengurangi Kemiskinan di Aceh. *Journal Public Policy*, 7(1), 75-82.
- Maghfiroh, H., Zubaidah, S., Mahanal, S., & Susanto, H. (2022). Challenges and opportunities of learning biology in the post-covid-19 pandemic: A systematic literature review and thematic synthesis. *Bioedusiana: Jurnal Pendidikan Biologi*, 7(1), 18-42.
- Mardhiah, A. (2022). Collaborative Governance Based on Policy Networks in The Formulation of Curriculum Integration. In *2nd International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM 2021)* (pp. 80-86). Atlantis Press. [10.2991/assehr.k.220302.013](https://doi.org/10.2991/assehr.k.220302.013)
- Maulidan, R., Gunanjar, I., Verinanda, M. R., Syahputra, R., & Hardianti, A. (2025). Pemetaan Literatur Kapabilitas Dinamis Pada Ukm di Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis. *Creative Research Management Journal*, 8(1), 28-43. <https://doi.org/10.32663/pxv3y031>
- Maylinda, E., & Agyansa, A. O. (2025). Perkembangan Analisis Wacana Kritis Terhadap Kebijakan: Tinjauan Pustaka Sistematis dan Analisis Bibliometrik. *Jejaring Administrasi Publik*, 17(2), 170–194. <https://doi.org/10.20473/jap.v17i2.84411>.
- Mujiansyah, M. (2024). Peran Kolaborasi Multi-sektor dalam Percepatan Pembangunan Wilayah Urban di Tanah Papua. Laporan Penelitian.
- Muksalmina, M., Gaja, EG, Chyntia, E., & Muammar, M. (2025). Model Penguatan Ekonomi Sekitar PT Pupuk Iskandar Muda Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 13 (1), 15–28. <https://doi.org/10.29103/reusam.v13i1.21898>
- Mulia, M., Zakki, F. K. (2021). Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Syariah Analisis Penerapan Syariat Islam, Aceh-Indonesia. *dalam JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 3(1), 97-106.
- Mutch, A. (2018). Practice, substance, and history: Reframing institutional logics. *Academy of Management Review*, 43(2), 242-258.
- Nuradhawati, R. (2026). *Administrasi dengan Paradigma Baru: Organisasi, Manajemen, dan Tata Kelola di Era Transformasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nurliana, N., Zulfikar, T. M., Ahmad, R., Akhyar, A., & Zamzami, Z. (2025). Collaborative Governance in Aceh's Mining Management: Towards Justice and Sustainability. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 7(1), 11. <https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.360>.
- Pradana, A. P., Akbar, D., Ananda, F., Husaini, H., Akbar, M., Noviana, V., ... & Syahputra, Z. A. (2024). Perkembangan Qanun Aceh Dalam Perubahan Sosial dan Politik di Aceh. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 64-77.
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of public administration research and theory*, 18(2), 229-252. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum015>.

- Purdy, J. M. (2012). A framework for assessing power in collaborative governance processes. *Public administration review*, 72(3), 409-417.
- Putra, N. H., & Amran, A. (2023). Dinamika Tata Kelola Dana Otonomi Khusus di Aceh. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(2), 192-213.
- Putri, M., Zafirah, T., Syahbudin, S., Melani, M., Azizah, A. N., & Wildhani, A. F. (2025). Sistem dan Problematika Kepemimpinan. *EDU SOCIETY: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 307-312.
- Radhiyati. (2020) *HAMBATAN-HAMBATAN KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH (STUDI KASUS BANDA ACEH, SABANG DAN JANTHO)*. Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ramadani, A. (2024). Analysis of Organizational Strengthening Dimensions in Institutional Capacity Building of the Aceh Ulama Consultative Assembly. *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, 8(2), 235-250.
- Riyanto, D. N. A. R., & Alfirdaus, L. K. (2024). Tantangan Dan Hambatan Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kebumen (Studi Kawasan Geopark Kebumen). *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 374-391.
- Riyanto, W. H. (2025). *Model Kelembagaan Daerah dalam Penanganan Kemiskinan*. UMMPress.
- Sakty, I. (2024). *Tata Kelola Jaringan Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional= Network Governance of the National Development Planning and Budgeting Synchronization* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Sarosa, W., Susetyo, N. A., & Kusuma, E. D. (2024). *Kota Tangguh Pasca Korona*. Mizan Media Utama
- Siregar, A. L. A. (2024). Peta jalan keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh. Neraca.co.id. <https://www.neraca.co.id/article/210084/peta-jalan-keberlanjutan-dana-otonomi-khusus-aceh>.
- Sitorus, A. V. Y., & Utami, L. P. (2023). Sektor Unggulan dan Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Bappenas Working Papers*, 6(2), 223-239.
- Snyder, H. (2019). Tinjauan pustaka sebagai metodologi penelitian: Gambaran umum dan pedoman. *Jurnal penelitian bisnis*, 104, 333-339.
- Syahputra, R. (2017). Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(1), 12-21.
- Tassya, A., & Nailufar, F. (2024). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *KESEJAHTERAAN Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5 (1), 1-13.
- Taufik., & Said, A. (2023). Triple Helix; Tantangan Kolaborasi Pemerintah, Universitas, Dan Industri Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Provinsi Aceh. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 12(2), 219-229.
- Tjoetra, A., Khairi, A., Mardhiah, N., & Marefanda, N. (2025). Community-centric governance: Unveiling the challenges and strategies in West Aceh villages. *Intellectual Discourse*, 33(3).
- Wahyuni, M., & Sari, K. M. P. (2025). Dinamika Kepemimpinan Kepala Daerah di Masa Transisi: Kajian Strategis Atas Tantangan, Adaptasi Dan Kolaborasi Pemerintahan Daerah. *Journal of Contemporary Public Administration*, 5(2), 63-71.
- Wulandjani, H., Widiyahseno, B., Utomo, E. N., Megaster, T., Sudarmanto, E., Saleha, D., ... & Islam, N. (2025). *Collaborative Governance*. Penerbit Minhaj Pustaka Indonesia.